

ISU Sepekan

BIDANG EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Minggu ke-3, Bulan Desember 2021 (tanggal 10 s.d. 16 Desember)

DIGITALISASI SEKTOR KEUANGAN



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Sony Hendra Permana
Peneliti Muda/Kebijakan Ekonomi
sony.hendra@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Digitalisasi keuangan merupakan salah satu pilar penting bagi pengembangan ekonomi di masa yad. Saat ini nilai ekonomi digital di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 70 miliar dolar AS---70%-nya kontribusi *e-commerce*. Berdasarkan riset Kearney, investasi pada sektor ekonomi digital di Indonesia mencapai 4,4 miliar dolar AS pada 2020. Pada tahun 2021, ekonomi digital ini mengalami pertumbuhan sebesar 49% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah ini diperkirakan semakin meningkat dengan akselerasi adopsi internet dan sarana digital. Pandemi Covid-19 juga turut memberikan perubahan yang signifikan kepada masyarakat dalam bertransaksi, di mana masyarakat lebih senang berbelanja secara *online* sebagai upaya mengurangi kontak langsung dan mengurangi resiko terinfeksi Covid-19. Kondisi ini mendorong pelaku usaha untuk menyesuaikan diri dengan memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan usahanya.

Digitalisasi keuangan juga diharapkan merambah ke pasar-pasar tradisional, yang saat ini nilai transaksinya diperkirakan mencapai Rp10 triliun per hari. Pasar tradisional dapat menggunakan skema pembayaran nontunai QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) yang dikembangkan Bank Indonesia. Dengan pemanfaatan skema pembayaran ini, masyarakat dapat meminimalisasi risiko kehilangan atau kerusakan jika membawa uang tunai dan meminimalisasi kontak dengan orang lain. Sementara itu, bagi pedagang dengan sistem ini tidak perlu menyiapkan uang kembalian, terhindar dari uang palsu, dan mengurangi biaya pengelolaan kas.

Digitalisasi keuangan juga telah menumbuhkan entitas baru di sektor keuangan, salah satunya *fintech*. Hadirnya *fintech* dapat menjangkau nasabah lebih banyak dan lebih cepat, sehingga mempercepat inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat secara merata. Namun begitu, saat ini tingkat literasi masyarakat terhadap keuangan digital masih rendah, yakni baru sebesar 36%. Masih rendahnya tingkat literasi ini telah dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, salah satunya dengan kehadiran *fintech* ilegal. Selama periode 2018-2021, Satgas Waspada Investasi menutup 3.365 skema pinjaman *fintech* ilegal di Indonesia.

SUMBER

Kompas, 7 Desember 2021; Bisnis Indonesia, 14 Desember 2021; Republika 14 Desember 2021; Media Indonesia, 15-16 Desember 2021.